



Laporan Kinerja

Triwulan I
2026



Balai Besar Penangkapan Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kata Pengantar

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka menjalankan *good governance*, juga memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan Kinerja yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Merujuk pada hal-hal tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Triwulan I 2026 yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan berbasis *balanced scorecard* (BSC).

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja BBPI bagi *stakeholders* dan sebagai bahan evaluasi dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja organisasi. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja BBPI dimasa mendatang. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya.



Semarang, 15 April 2026

Pt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan

Umar Soleh

Bab I

Pendahuluan

A.

Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari posisi dan potensi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mencapai $\frac{3}{4}$ dari total wilayah dengan kekayaan sumberdaya yang luar biasa yang terkandung di dalamnya.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah menetapkan beberapa strategi kebijakan. Salah satunya dengan meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Strategi yang dilaksanakan mencakup pemberantasan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, meningkatkan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, penataan perikanan usaha perikanan, penerapan manajemen kuota penangkapan, perlindungan dan penangkapan spesies tertentu.

Selanjutnya, larangan terhadap ekspor benih ikan tertentu (sidat dan lobster), perlindungan *spawning ground*, rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, lain pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, KKP telah juga menetapkan strategi kebijakan lainnya, yakni meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran masyarakat. Kemudian, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi inovatif yang berkepribadian, serta membangun kemandirian pemerintah guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan disusun dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk melalui konsultasi publik untuk menggali masukan. Penyusunan rencana strategis melalui konsultasi publik ini melibatkan berbagai stakeholder, antara lain akademisi, asosiasi dan perbankan, Kementerian/Lembaga dan Pemda serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media.

Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan 2025 - 2029

Sejalan dengan RPJMN 2026-2029, arah kebijakan dan pembangunan dan perikanan didasari oleh perubahan mindset bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki.

Empat aspek kerangka pikir pembangunan ekonomi biru

1.

Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Main System

Menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sistem utama dan sektor unggulan (*leading sector*) yang didukung oleh sektor-sektor lainnya untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang baru.

2.

Ekologi Sebagai Panglima

Memprioritaskan perlindungan ekosistem laut dan pesisir sebagai pusat penyerapan karbon dunia guna memastikan keberlanjutan sumber daya hayati dan mitigasi perubahan iklim.

3.

Market Driven Oriented

Mengembangkan pembangunan kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap tuntutan pasar domestik maupun global guna meningkatkan daya saing kompetitif dan komparatif secara terus-menerus.

4.

Pendekatan Teknologi

Memanfaatkan teknologi informasi, digitalisasi, dan teknologi satelit untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta akses data secara akurat dan tepat waktu (*real-time*).

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* dan **Permenpan Nomor 53 Tahun 2014** tentang *Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu, setiap Kementerian berkewajiban menyusun LKj*.

Penyusunan LKj BBPI Tahun 2026 dilakukan dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada. Dengan demikian kinerja BBPI dapat terukur berdasarkan capaian atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2026.

Dalam LKj BBPI Tahunan 2026 ini diuraikan tentang keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja selama Tahun 2026. Setiap pelaksanaan kegiatan yang terstruktur meliputi Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja TA 2026.

Dokumen LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan RENSTRA maupun RKT yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

B. Tugas dan Fungsi

Pada tahun 2020 nomenklatur berubah menjadi Balai Besar Penangkapan Ikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan.

1.

Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang penangkapan ikan

2.

Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang penangkapan ikan

3.

Pelaksanaan dan penyebarluasan uji terap habitat sumber daya ikan

4.

Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang penangkapan ikan

5.

Pelaksanaan penerapan dan penyebarluasan uji terap teknik sarana penangkapan ikan

6.

Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkapan ikan

7.

Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi dan sertifikasi di bidang penangkapan ikan

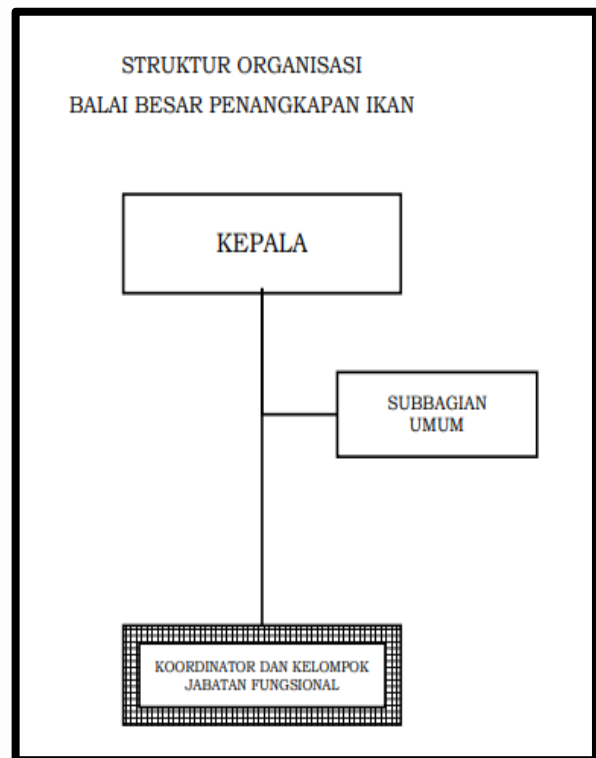
8.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan

C.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Susunan Organisasi Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana pasal 5 ayat (1) terdiri atas Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.



D.

Isu Strategis

Masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang menyebabkan pengelolaan perikanan dan jasa kelautan belum optimal. Di sisi lain, terdapat pula permasalahan internal di BBPI yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

Permasalahan Internal BBPI

1.

Rendahnya kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan terutama karena tingkat pendidikan yang rendah

2.

Ketidakseimbangan pemanfaatan ikan antar WPP, serta status sumberdaya ikan di beberapa

3.

Persepsi otonomi daerah yang belum sinergi sehingga timbul konflik pemanfaatan dan konflik antar nelayan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah

4.

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) di laut lepas belum optimal, karena keberagaman jenis SDI dan sarana penangkapan ikan belum didukung budaya nelayan yang maju

5.

Belum lengkapnya standardisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan awak kapal perikanan, serta kepatuhan pelaku usaha

6.

Dukungan rekayasa teknologi penangkapan belum optimal seperti penggunaan teknologi alat bantu penangkapan ikan

7.

Wilayah kerja BBPI yang mencakup 11 WPP (seluruh nusantara), mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan teknologi penangkapan ikan di daerah terpencil;

8.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan tidak terkendalinya eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas petugas penegak hukum di lapangan

9.

Pelaksanaan penerapan dan penyebarluasan uji terap teknik sarana penangkapan ikan

10.

Adanya kerusakan habitat vital di laut/pesisir yang disebabkan pencemaran, perusakan oleh manusia, maupun faktor bencana alam, akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem/lingkungan

11.

Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis

12.

Kurangnya database kondisi dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia beserta perangkat penunjang analisis

13.

Era globalisasi dan pasar bebas yang mulai diterapkan tahun 2010 menuntut Indonesia sebagai negara produsen produk perikanan yang sesuai standar mutu dan layak ekspor

14.

Kinerja BBPI belum optimal, pemberdayaan sarana dan prasarana, kontinuitas dan sinergitas kegiatan kerekayasaan serta rekrutmen Pegawai

E.

Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini melaporkan capaian kinerja BBPI Triwulan I Tahun 2026 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan berbagai kendala dalam pencapaian kinerja.

Bab I

Memuat uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi serta isu- strategis terkait dengan tugas dan fungsi

Bab II

Memuat capaian kinerja organisasi serta evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan

Bab III

Memuat visi dan misi BBPI, tujuan dan sasaran serta rencana kinerja dan anggaran Tahun 2026, dan perjanjian kinerja BBPI Tahun 2026

Bab IV

Memuat kesimpulan kinerja dalam menyelesaikan isu strategis dan saran strategi peningkatan kinerja periode selanjutnya

Bab II

Perencanaan Kinerja

A.

Visi dan Misi

Berdasarkan visi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi KKP 2025-2029 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025-2029 adalah

“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sehingga untuk mewujudkan Visi tersebut, maka BBPI memiliki visi

“Terwujudnya Penangkapan Ikan Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Untuk dapat mewujudkan Misi dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Perikanan Tangkap, maka BBPI menerapkan misi sebagai berikut

1.

Mewujudkan penangkapan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan

2.

Mewujudkan pelayanan jasa, bimbingan teknis, kerjasama teknis, pengelolaan dan pelayanan informasi sistem penangkapan ikan yang prima

3.

Mewujudkan pengujian, penyiapan bahan standar di bidang sarana penangkapan dan habitat sumber daya ikan, serta sertifikasi pengelolaan penangkapan ikan yang handal

4.

Meningkatkan pengelolaan organisasi, fasilitas, keuangan dan Sumberdaya Manusia yang terintegrasi

B. Sasaran Program

Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang telah menetapkan Penetapan Kinerja yang berisikan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang telah disepakati antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Penetapan kinerja ini digunakan sebagai acuan kinerja BBPI Semarang dan sebagai pengukuran tingkat keberhasilan kerja selama satu tahun anggaran. Berikut adalah sasaran strategis BBPI Semarang sesuai dengan Penetapan Kinerja yang berbasis *Balance Score Card* (BSC) :

1.

Nilai PNBP sektor Perikanan Tangkap meningkat di Balai Besar Penangkapan Ikan

- Penerimaan PNBP Non SDA di Balai Besar Penangkapan Ikan (juta rupiah).

2.

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing di Balai Besar Penangkapan Ikan

- Persentase Desain Sarana Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap (persen);
- Persentase Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap (persen);
- Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diusulkan (rekomendasi);
- Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap yang Diperoleh dari Perumusan Standar (rekomendasi);
- Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Dikaji Ulang (rekomendasi);
- Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Diuji (persen);

- Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Disertifikasi (persen);
- Persentase Kerjasama Yang Implementatif (persen).

3.

Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Balai Besar Penangkapan Ikan

- Persentase Peningkatan Kompetensi Nelayan (persen)

4.

Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan

- Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Penangkapan Ikan (Nilai).
- Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen).
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai).
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Balai Besar Penangkapan Ikan (indeks).

- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Balai Besar Penangkapan Ikan (persen).
- Persentase Pengelolaan BMN Balai Besar Penangkapan Ikan (persen).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penangkapan Ikan.
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai).
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai).

C. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan termasuk BBPI.

Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2025, BBPI telah menetapkan perencanaan kinerja beserta dukungan anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam tahun bersangkutan.

Target Output 2026

1.

Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun

1 Rekomendasi

2.

Jumlah Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi

1 Produk

3.

Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 Unit

4.

Layanan Perkantoran

1 Layanan

Dukungan anggaran untuk pembangunan BBPI pada Tahun 2026 berjumlah **Rp.20.075.236.000,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta rupiah dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Anggaran Tahun 2026

No	Program	Anggaran (RP)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan pengawakan kapal perikanan	439.508.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	19.635.728.000
TOTAL		20.075.236.000

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. BBPI telah membuat perjanjian kinerja tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja telah pada Renstra BBPI Tahun 2025-2029.

Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

2.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;

5.

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026

Sasaran Kegiatan

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Balai Besar Penangkapan Ikan

IKU 1

Penerimaan PNBP Non SDA di Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(juta) **213.891**

Sasaran Kegiatan

Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Balai Besar Penangkapan Ikan

IKU 2

Persentase Desain Sarana Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap

Target
(persen) **100**

IKU 3

Persentase Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap

Target
(persen) **100**

IKU 4

Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diusulkan

Target
(rekomendasi) **3**

IKU 5

Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diperoleh Dari Perumusan Standar

Target
(rekomendasi) **3**

IKU 6

Standar Nasional Indonesia (SNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Dikaji Ulang

Target
(rekomendasi) **3**

IKU 7

Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Diuji

Target
(persen) **100**

IKU 8

Persentase Permohonan Sarana
Penangkapan Ikan Yang Disertifikasi

Target
(persen) **100**

IKU 9

Persentase Kerjasama Bidang Perikanan
Tangkap Yang Implementatif

Target
(persen) **100**

Sasaran Kegiatan

Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Yang
Tersertifikasi/Terlindungi di Balai Besar
Penangkapan Ikan

IKU 10

Persentase Peningkatan Kompetensi
Nelayan

Target
(persen) **80**

Sasaran Kegiatan

Tata kelola Pemerintahan yang baik di
lingkungan Balai Besar Penangkapan Ikan

IKU 11

Nilai PM Pembangunan ZI WBK Balai
Besar Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **75,5**

IKU 12

Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja

Target
(persen) **86**

IKU 13

Nilai PM SAKIP Balai Besar Penangkapan
Ikan

Target
(nilai) **88,2**

IKU 14

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar
Penangkapan Ikan

Target
(indeks) **84,5**

IKU 15

Persentase Rencana Umum Pengadaan
PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP di
Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(persen) **77**

IKU 16

Presentase Pengelolaan BMN di Balai
Besar Penangkapan Ikan

Target
(NILAI) **82**

IKU 17

Nilai IKPA lingkup Balai Besar
Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **92,1**

IKU 18

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **71,75**

IKU 19

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(indeks) **88,80**

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A.

Capaian Kinerja Organisasi

IKU 1

Penerimaan PNBP Non SDA di Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(juta) **213.891**

Realisasi
(juta) **108.110**

IKU 2

Persentase Desain Sarana Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap

Target
(persen) **100**

Realisasi
(persen) **-**

IKU 3

Persentase Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap

Target
(persen) **100**

Realisasi
(persen) **-**

IKU 4

Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diusulkan

Target
(rekomendasi) **3**

Realisasi
(rekomendasi) **-**

IKU 5

Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diperoleh Dari Perumusan Standar

Target
(rekomendasi) **3**

Realisasi
(rekomendasi) **-**

IKU 6

Standar Nasional Indonesia (SNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Dikaji Ulang

Target
(rekomendasi) **3**

Realisasi
(rekomendasi) **-**

IKU 7

Persentase Permohonan Sarana

Penangkapan Ikan Yang Diuji

Target
(persen) **100**

Realisasi
(persen) **-**

IKU 8

Persentase Permohonan Sarana

Penangkapan Ikan Yang Disertifikasi

Target
(persen) **100**

Realisasi
(persen) **-**

IKU 9

Persentase Kerjasama Bidang Perikanan

Tangkap Yang Implementatif

Target
(persen) **100**

Realisasi
(persen) **-**

IKU 10

Persentase Peningkatan Kompetensi
Nelayan

Target
(persen) **80**

Realisasi
(persen) **-**

IKU 11

Nilai PM Pembangunan ZI WBK Balai

Besar Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **75,5**

Realisasi
(nilai) **-**

IKU 12

Persentase Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja

Target
(persen) **86**

Realisasi
(persen) **100**

IKU 13

Nilai PM SAKIP Balai Besar

Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **88,2**

Realisasi
(nilai) **-**

IKU 14

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar

Penangkapan Ikan

Target
(indeks) **84,5**

Realisasi
(persen) **-**

IKU 15

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP di Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(persen) **77**

Realisasi
(persen) **100**

IKU 16

Persentase Pengelolaan BMN di Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **82**

Realisasi
(nilai) **-**

IKU 17

Nilai IKPA lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **92,1**

Realisasi
(nilai) **-**

IKU 18

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(nilai) **71,75**

Realisasi
(nilai) **-**

IKU 19

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(indeks) **88,80**

Realisasi
(indeks) **92,64**

Adapun pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5.

Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B.

Capaian Anggaran

Hingga Triwulan I 2026 realisasi anggaran BBPI telah mencapai **19,00%** sebesar **Rp.2.099.990.799,-** (dua milyar Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut

No	Program	Anggaran (RP)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan pengawakan kapal perikanan	19.208.910
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.080.781.889
TOTAL		2.099.990.799

Berdasarkan tabel diatas terdapat perubahan anggaran hingga Triwulan I antara lain :

1. Revisi Halaman III DIPA, sebanyak 2 kali yaitu
 - a. Revisi DIPA 1 tanggal 2 Januari 2026 nomor DS 4380-2917-0049-8405
 - b. Revisi DIPA 2 tanggal 13 Februari 2026 nomor DS 4380-2917-0049-8405

Evaluasi dan Analisis



Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Non SDA di Balai Besar Penangkapan Ikan

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)

Perhitungan pada indicator IKU ini adalah nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target dan Realisasi

Target 2026 (juta)	213.891
Target TW I (juta)	53.470
Realisasi TW I (juta)	108.110
Prosentase (persen)	202.19

Realisasi IKU 1 Triwulan I 2026 melebihi target yaitu Rp108.1100.000 dari target Rp53.470.000,- dengan prosentase capaian kinerja 202,19% dengan rincian sebagai berikut :

Kode 425151

Target

74.631.000

Realisasi

19.070.000

25,55%

Kode 425289

Target

28.000.000

Realisasi

42.000.000

150,0%

Kode 425629

Target

107.360.000

Realisasi

47.040.000

43,82%

Kode 425692

Target 3.900.000

Realisasi -

0,00%**Perbandingan dengan Tahun
sebelumnya pada periode yang sama**Realisasi **0,00%**

Triwulan I 2023

Realisasi **120,00%**

Triwulan I 2024

Realisasi **120,00%**

Triwulan I 2025

Realisasi **120,00%**

Triwulan I 2026

Selama tiga periode Triwulan I berturut-turut (2024–2026), BBPI Semarang berhasil mempertahankan capaian di angka maksimal **120,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada awal tahun anggaran selalu berhasil dipenuhi dan dilampaui dengan sangat baik melalui optimalisasi layanan jasa dan pemanfaatan aset.

Capaian 120,00% di Triwulan I 2026 membuktikan bahwa strategi percepatan realisasi pendapatan di awal tahun telah menjadi standar kerja yang baku di BBPI. Hal ini meminimalisir risiko penumpukan target di akhir tahun dan memastikan kontribusi terhadap kas negara berjalan secara berkala.

Secara keseluruhan, realisasi capaian IKU Penerimaan PNPB Non-SDA pada Triwulan I 2026 menunjukkan kondisi yang **sangat baik**. Dengan mempertahankan angka maksimal 120,00%, BBPI Semarang membuktikan akuntabilitas dan produktivitas yang stabil dalam memberikan pelayanan publik yang berdampak pada pendapatan negara, setara dengan standar kinerja terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

**Membandingkan realisasi dengan
standar nasional**

Untuk membandingkan realisasi dengan standar nasional, maka BBPI membandingkan IKU yang sama dengan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang setara tingkatan eselon II dengan BBPI, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, dengan perbandingan sebagai berikut :

Realisasi BBPI **120,00%**

Triwulan I 2026

Realisasi PPS NZ **120,00%**

Triwulan I 2026

Berdasarkan data di atas, realisasi capaian IKU Penerimaan PNBP Non-SDA BBPI pada Triwulan I 2026 sebesar **120,00** menunjukkan angka yang identik dengan capaian PPS Nizam Zachman. Hal ini mengindikasikan bahwa BBPI mampu menjaga ritme kinerja yang setara dengan unit kerja skala besar lainnya dalam lingkup nasional.

Keberhasilan menyamai angka realisasi PPS Nizam Zachman (sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia) menunjukkan bahwa BBPI telah mengoptimalkan potensi aset dan jasa layanannya secara maksimal pada awal tahun anggaran 2026.

Meskipun karakteristik objek PNBP Non-SDA antara BBPI (fokus pada teknologi penangkapan) dan PPS Nizam Zachman (fokus pada jasa pelabuhan) memiliki perbedaan teknis, pencapaian angka yang sama membuktikan efektivitas sistem pemungutan dan administrasi PNBP di BBPI sudah berjalan sesuai dengan standar operasional yang unggul.

Capaian ini menegaskan bahwa Balai Besar Penangkapan Ikan memiliki performa yang kompetitif dan akuntabel.

Dengan mampu menyamai realisasi capaian PPS Nizam Zachman, BBPI telah memenuhi ekspektasi standar nasional untuk unit kerja setingkat eselon II dalam hal kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-SDA di sektor kelautan dan perikanan.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Realisasi capaian IKU 1 pada Triwulan I telah mencapai target, hal ini disebabkan

1.

Sebagai unit kerja yang berfokus pada teknologi penangkapan ikan, kenaikan realisasi ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan atas layanan teknis. Hal ini mencakup Pengujian alat penangkapan ikan yang sesuai standar, Pemanfaatan hasil produksi dari kegiatan riset/perekayasaan yang dapat dikomersialkan sesuai **PP Nomor 85 Tahun 2021**, Tingginya kepercayaan stakeholder (nelayan dan pengusaha perikanan) untuk menggunakan jasa layanan BBPI.

2.

Keberhasilan ini didorong oleh manajemen aset yang lebih agresif dibandingkan tahun sebelumnya. BBPI Semarang berhasil memaksimalkan penggunaan sarana dan yang masuk dalam kategori PNBPN Non-SDA

3.

Kemampuan BBPI menunjukkan adanya standarisasi kerja yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa meskipun BBPI memiliki fokus tugas dan fungsi (tusi) yang berbeda dengan pelabuhan samudera, efisiensi dalam mengejar target PNBPN Non-SDA tetap berada di level tertinggi.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Adapun untuk mencapai tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Prosentase Capaian Kinerja}}{\text{Prosentase Realisasi Anggaran}} \geq 1$$

Keterangan:

1.

Jika input yang ditargetkan berbanding input actual lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi telah tercapai

2.

Jika input yang ditargetkan berbanding input actual kurang daripada 1 maka efisiensi tidak tercapai

Keterbatasan Analisis Efisiensi Anggaran Sama halnya dengan beberapa indikator layanan lainnya, nilai efisiensi penggunaan sumber daya untuk IKU 1 ini tidak dapat dihitung secara matematis. Hal ini terlihat pada Tabel 9 di mana kolom Anggaran, Target ROK, maupun Realisasi biaya menunjukkan tanda strip (-) atau tidak memiliki data numerik. Ketiadaan data ini mengindikasikan bahwa proses pencapaian target PNBPN tersebut tidak memiliki alokasi biaya operasional yang melekat secara langsung pada struktur anggaran program di RKAKL.

Implikasi Tata Kelola Sumber Daya Tidak adanya anggaran yang melekat pada RKAKL untuk mendukung pencapaian IKU 1 menunjukkan bahwa pengumpulan PNBPN dilakukan melalui mekanisme fungsi administratif rutin atau layanan

yang sudah tersedia di BBPI. Meskipun tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan untuk mengejar target ini, unit kerja tetap dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai kode akun seperti 425151 hingga 425692. Ketidadaan dukungan anggaran langsung ini mengharuskan BBPI untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada guna meningkatkan efektivitas pemungutan PNBP hingga mencapai target maksimal di akhir periode.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 1 antara lain :

Januari

1.

Pengujian Jaring sebanyak 19 sampel oleh PT. King Dragon Net

2.

Penggunaan Asrama Mina Bahari oleh Hamzah pada tgl 01 sd 05 Januari 2026

3.

Penggunaan Asrama Mina Bahari oleh Zainudin pada tgl 01 sd 11 Januari 2026

4.

Penggunaan Aula Lantai 3 kapasitas 100 org oleh Dit. Polairud

5.

Pengujian Mesin Outboard 2 Langkah Bahan Bakar Bensin Daya 15 HP dan 40 HP sebanyak 2 sampel oleh PT. Majulah Putra Bangsa

6.

penggunaan Kapal untuk Uji Mesin Ouboard 2 Langkah Bahan Bakar Mesin Daya 15 HP dan 40 HP sebanyak 2 unit selama 4 jam oleh PT. Majulah Putra Bangsa

7.

Pengujian Mata Pancing sebanyak 13 sampel oleh PT. Perintis Sarana Pancing

8.

Penggunaan asrama mina bahari dalam rangka magang (tanggal 5-23 Januari 2026) 5 Orang 19 hari a.n Halim Muhammad Ghozy

Februari

1.

pengujian mesin motor tempel Mercury sebanyak 1 sampel oleh PT. Marina Maju Jaya.

2.

penggunaan Kapal untuk Uji Motor Tempel Mercury oleh PT. Marina Maju Jaya

3.

pengujian Elongation benang dan jaring sebanyak 38 sampel oleh PT. Arteri Daya Mulia

4.

pengujian Breaking Strength benang dan jaring sebanyak 38 sampel oleh PT. Arteri Daya Mulia

5.

Penggunaan peralatan untuk pengujian benang dan jaring oleh PT. Arteria Daya Mulia.

6.

Penggunaan peralatan untuk pengujian benang dan jaring oleh PT. Arteria Daya Mulia

7.

penggunaan Jangka Sorong selama 3 hari oleh PT. Inti Jaringmas Fishing Net Industri

Maret

1.

penggunaan kapal uji oleh PT. Adiguna Perkasa Tridaya

2.

pengujian mesin tempel oleh PT. Adiguna Perkasa Tridaya

3.

Pengujian benang/tali oleh PT.Perintis Sarana Pancing Indonesia

4.

Penggunaan Jangka Sorong selama 10 hari oleh PT. Perintis Sarana Pancing Indonesia

5.

Penggunaan Toolkit sebanyak 1 Paket oleh PT. Perintis Sarana Pancing Indonesia

6.

Pengujian benang/tali (Elongation) sebanyak 6 sampel oleh PT. Perintis Sarana Pancing Indonesia

Pencapaian kinerja yang maksimal (120,00%) didukung oleh diversifikasi layanan jasa teknis dan optimalisasi aset BMN yang intensif selama tiga bulan pertama tahun 2026. Faktor-faktor penunjang utamanya adalah:

1.

Kegiatan pengujian merupakan kontributor paling konsisten. BBPI berhasil menarik kemitraan dengan berbagai pihak swasta (seperti PT King Dragon Net, PT Arteria Daya Mulia, dan PT Perintis Sarana Pancing) untuk melakukan Uji jaring, mata pancing, serta pengujian spesifik seperti *Elongation* (kemuluran) dan *Breaking Strength* (kekuatan putus) benang/tali dan Pengujian mesin outboard (2 langkah dan bensin) oleh PT Majulah Putra Bangsa dan PT Marina Maju Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium dan tenaga penguji BBPI diakui secara standar teknis oleh industri perikanan nasional.

2.

Pemanfaatan aset fisik untuk kegiatan pihak ketiga memberikan kontribusi signifikan terhadap PNBP Non-SDA melalui Penggunaan Asrama Mina Bahari oleh perorangan maupun kelompok magang. Penggunaan Aula Lantai 3 untuk kegiatan instansi lain (seperti Dit. Polairud). Sewa pakai peralatan pengujian benang/jaring serta alat ukur presisi seperti Jangka Sorong oleh PT Inti Jaringmas Fishing Net dan mitra lainnya.

3.

Terdapat aktivitas penggunaan kapal untuk keperluan uji mesin tempel (seperti oleh PT Adiguna Perkasa Tridaya). Penggunaan kapal uji sebagai platform pengujian mesin menunjukkan integrasi layanan yang komprehensif, di mana BBPI tidak hanya menyediakan pengujian komponen (statis) tetapi juga pengujian performa di lapangan (dinamis).

4.

Daftar kemitraan yang luas mencakup lebih dari 5 perusahaan berbeda dalam satu triwulan menunjukkan bahwa program diseminasi layanan BBPI berjalan efektif. Kepercayaan sektor swasta untuk menggunakan jasa teknis BBPI Semarang menjadi kunci utama stabilitas realisasi pendapatan.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU 1

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 1 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026 adalah

1.

Efisiensi anggaran secara nasional yang menyebabkan terbatasnya bahan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan pelayanan yang mendukung capaian realisasi IKU

2.

keterbatasan SDM yang kinerjanya sangat dinamis mengikuti kegiatan tugas dan fungsi di BBPI maupun diluar BBPI.

IKU 2

***Persentase Desain Sarana
Pemanfaatan Sumber Daya Ikan
Yang Digunakan Oleh Stake
Holders Perikanan Tangkap***

Desain sarana pemanfaatan sumber daya ikan yang dihasilkan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan yang digunakan sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan stake holders perikanan tangkap

Perhitungan indicator IKU ini adalah

$$\% \text{ Desain SPSPDI} = A1 / A2$$

Keterangan

A 1 = Desain Sarana Pemanfaatan

Sumber Daya Ikan Yang Digunakan

A2 = Desain Sarana Pemanfaatan

Sumber Daya Ikan Yang Dihasilkan

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	100,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 2 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 2 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realiasasi IKU 2 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU 2 dikarenakan kegiatan pendukung pencapaian IKU tidak didukung anggaran BBPI TA.2026.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 1 antara lain :

Januari

Updating status SNI perikanan tangkap hingga Januari 2025 yang terdiri atas 193 SNI yang diantaranya diabolisi sebanyak 62 SNI dan direvisi sebanyak 37 SNI serta SNI yang masih berlaku sebanyak 90 SNI.

Februari

Pembahasan rencana kegiatan pencapaian IKU dan penetapan tim teknis desain sarana pemanfaatan SDI

Maret

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 2 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

IKU 3

Persentase Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap

Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang dihasilkan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan yang digunakan sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan stake holders perikanan tangkap

Perhitungan indicator IKU ini adalah

$$\% \text{ Rekomendasi Teknis Teknologi PSDI} = A1 / A2$$

Keterangan :

A1:

Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan

A2:

Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Dihasilkan, dengan catatan bahwa A2 merupakan jumlah rekomendasi yang dihasilkan secara keseluruhan selama periode tahun berjalan.

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	100,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 3 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	■
Target Menengah Dalam Renstra	■

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 3 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realisasi IKU 3 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 3 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 3 antara lain :

Januari

1.

Koordinasi internal membahas rencana kegiatan yang mendukung tercapainya IKU

2.

Koordinasi dengan KAPI terkait kegiatan yang mendukung program kegiatan Dit. KAPI

Februari

1.

Penyiapan perangkat untuk pengambilan data API maupun kapal perikanan

Agar rekomendasi teknis digunakan, BBPI harus memastikan produk teknologi bersifat solutif, bukan sekadar eksperimental serta melakukan pengembangan alat penangkapan ikan (API) yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Jika teknologi terbukti meningkatkan hasil tangkapan atau menurunkan biaya operasional dalam satu musim, probabilitas adopsi permanen akan meningkat tajam. Oleh karena itu perlu adanya Uji coba lapangan secara partisipatif melibatkan kelompok nelayan local khususnya bagi mereka yang sulit mengadopsi teknologi tanpa bukti empiris di lapangan. Serta dilakukan Pendampingan pasca-pelatihan sangat krusial untuk memastikan teknologi tidak ditinggalkan saat terjadi kendala teknis kecil.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 3 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Terbatasnya anggaran karena efisiensi secara nasional menyebabkan pendampingan teknologi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga representasi data secara nasional menurun yang berisiko menghasilkan rekomendasi teknis kurang teruji secara komprehensif

2.

Keterbatasan SDM berkompeten serta Ketidakseimbangan beban kerja ganda menyebabkan kinerja IKU menjadi fluktuatif dan sulit diprediksi sehingga mengalami keterlambatan terlaksananya kegiatan penunjang tercapainya rekomendasi teknis tepat waktu.

IKU 4

Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diusulkan

Bahan RSNI yang disiapkan adalah jumlah makalah RSNI lingkup Perikanan Tangkap yang siap diusulkan dalam Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Perhitungan indikator IKU ini adalah Jumlah bahan RSNI lingkup Perikanan Tangkap dalam bentuk makalah RSNI yang siap diusulkan dalam Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	3,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 4 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 4 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realisasi IKU 4 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 4 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 4 antara lain :

Januari

1.

Rapat koordinasi perumusan RSNi TA.2026

2.

Rapat pembahasan program nasional perumusan standar tahun 2026

Februari

1.

Review kebutuhan standar diantaranya adopsi ISO 16315, 12215, 16304:2018 dan 7277-15-2021

Maret

1.

Penyiapan dokumen usulan PNPS ISO 8665-2:2024, 8729-1:2010, 16304:2018, dan 16315:2026

Untuk menghasilkan makalah RSNi yang berkualitas dan siap diusulkan dalam PNPS, diperlukan rangkaian kegiatan sistematis diantaranya Melakukan *gap analysis* antara teknologi yang ada di lapangan dengan standar yang sudah tersedia, Penyusunan dokumen yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan kesiapan bibliografi/referensi teknis sesuai format BSN, Melibatkan pakar internal dan praktisi untuk membedah substansi teknis makalah agar saat diusulkan ke Komite Teknis (Komtek), dokumen sudah matang dan minim revisi serta Melakukan pengujian laboratorium atau uji coba lapangan untuk mendapatkan angka-angka teknis yang akan dicantumkan dalam draf standar.

Kendala dan Permasalahan **Capaian IKU**

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 4 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Kesenjangan antara beban kerja teknis dengan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi spesifik menjadi hambatan utama dalam proses standardisasi . Terjadinya benturan beban kerja di mana personel teknis yang sama ditugaskan untuk mengampu kegiatan lapangan (pendampingan teknologi) sekaligus kegiatan administratif-strategis (penyusunan RSNi). Hal ini mengakibatkan proses perumusan makalah RSNi menjadi kurang optimal akibat keterbatasan waktu fokus (*deep work*) yang tersita oleh mobilitas kegiatan eksternal.

2.

Penyusunan RSNi yang kredibel sangat bergantung pada pengujian laboratorium dan uji petik di laut (*sea trial*). Pengurangan alokasi anggaran pada komponen uji coba berdampak pada melemahnya basis data ilmiah (*scientific basis*), sehingga makalah RSNi memiliki risiko tinggi untuk ditolak atau dikembalikan pada saat rapat usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).

Proses standardisasi memerlukan pelibatan multipihak (akademisi, praktisi industri, dan regulator). Terbatasnya anggaran untuk kegiatan koordinasi dan harmonisasi mengakibatkan proses penyepakatan parameter teknis yang sensitif tidak dapat dilakukan secara intensif, yang berpotensi memperpanjang durasi penetapan standar.



Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diperoleh Dari Perumusan Standar

Bahan RSNI yang disiapkan adalah jumlah RSNI-3 lingkup Perikanan Tangkap yang telah disepakati dalam Rapat Konsensus sesuai Program Nasional Perumusan STandar (PNPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Perhitungan indicator IKU ini adalah Jumlah RSNI-3 lingkup Perikanan Tangkap yang telah disepakati dalam Rapat Konsensus sesuai Program Nasional Perumusan STandar (PNPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	3,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 5 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi
Triwulan I 2023 -%

Realisasi
Triwulan I 2024 -%

Realisasi
Triwulan I 2025 -%

Realisasi
Triwulan I 2026 -%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi
Triwulan I 2026 -

Target Menengah
Dalam Renstra -

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 5 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realiasasi IKU 5 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 5 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 5 antara lain :

Januari

1.

Pengusulan konseptor dan editor PNPS TA.2026

Februari

1.

Penetapan surat keputusan direktur KAPI tentang penetapan konseptor dan editor PNPS Tahun 2026

Penyiapan konsep RSNI diantaranya kapal perikanan metode uji mesin diesel serbaguna, pengurangan dan penanganan limbah pada kapal penangkap ikan, dan alat penangkapan ikan bubu lipat bubu rajungan tipe kotak

Maret

1.

Penyiapan bahan pembuatan alat ukur kecepatan putar mesin diesel serbaguna

Untuk memastikan RSNI-3 dapat disepakati dalam Rapat Konsensus, BBPI perlu menjalankan program antara lain Penyusunan Dokumen RSNI-1 dan RSNI-2 yang Komprehensif yang melibatkan penulisan detail spesifikasi teknis, metode uji, dan persyaratan umum alat/teknologi penangkapan ikan. serta diadakannya Kegiatan pembahasan draf secara mendalam dengan anggota Komite Teknis (Komtek). Keberhasilan di tahap ini menentukan apakah draf layak naik ke tahap jajak pendapat. dan Pelaksanaan Rapat Konsensus untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi teknis untuk memastikan semua pihak (terutama industri) menyepakati standar yang disusun.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 5 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi

atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026,
antara lain :

1.

Kompleksitas Konsensus Multipihak sangat bergantung pada faktor eksternal. Adanya resistensi dari pelaku usaha terhadap parameter teknis tertentu (misal: ukuran mata jaring atau spesifikasi bahan) dapat menghambat tercapainya kesepakatan, sehingga proses konsensus mengalami kebuntuan (*deadlock*).

2.

Proses siklus perumusan standar nasional memiliki linimasa yang ketat. Keterlambatan pada satu tahapan (misal: perpanjangan masa jajak pendapat) dapat menyebabkan target RSNI-3 bergeser ke tahun anggaran berikutnya, sehingga memengaruhi capaian kinerja tahun berjalan.

3.

Pada tahap konsensus, argumen harus didasarkan pada data pengujian yang valid. Keterbatasan anggaran untuk melakukan uji banding atau validasi ulang terhadap masukan jajak pendapat dapat melemahkan posisi BBPI sebagai konseptor standar.

IKU 6

Standar Nasional Indonesia (SNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Dikaji Ulang

SNI yang disiapkan adalah jumlah SNI lingkup Perikanan Tangkap yang dibahas dalam Rapat Kaji Ulang SNI untuk direkomendasikan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Perhitungan indikator IKU ini adalah makalah SNI lingkup Perikanan Tangkap yang dibahas dalam Rapat Kaji Ulang SNI untuk direkomendasikan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	3,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 6 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 6 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realiasasi IKU 6 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 6 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 6 antara lain :

Januari

1.

Updating status SNI perikanan tangkap sebanyak 193 SNI yang terdiri atas 90 SNI berlaku, 99 SNI tidak berlaku dan 4 SNI konfirmasi

Februari

1.

Digitalisasi pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sektor perikanan tangkap

1.

Maret

Penentuan dan review tertulis SNI yang akan dikaji ulang

Pencapaian IKU ini melibatkan proses evaluasi kritis terhadap standar yang sudah ada dengan melakukan kegiatan antara lain Identifikasi dan Inventarisasi SNI (Masa Bakti 5 Tahun), Menyiapkan dokumen teknis yang berisi justifikasi apakah sebuah SNI perlu **Dikonfirmasi** (tetap berlaku), **Direvisi** (diperbarui), atau **Abrogasi** (dicabut), Melibatkan pakar teknis BBPI untuk meninjau apakah parameter dalam SNI masih sesuai dengan alat tangkap yang digunakan nelayan saat ini. dan Menyampaikan hasil rekomendasi kaji ulang ke BSN agar status *updating* SNI di sistem informasi BSN (SISPK) dapat diperbarui.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 6 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Terbatasnya SDM yang memahami sejarah penyusunan SNI lama (karena rotasi atau purnabakti) menyebabkan proses "justifikasi teknis" dalam makalah kaji ulang seringkali kurang tajam. Dengan jumlah 193 SNI yang harus dikelola, rasio jumlah fungsional pembina standar di BBPI tidak sebanding dengan volume dokumen yang harus dikaji, sehingga pengkajian seringkali dilakukan secara reaktif (saat ada permintaan) bukan proaktif.

2.

Untuk merekomendasikan sebuah SNI tetap berlaku atau direvisi, idealnya dilakukan uji petik di lapangan. Efisiensi anggaran membatasi kemampuan tim untuk memverifikasi apakah standar masih bisa diimplementasikan oleh stakeholders saat ini tanpa kendala teknis.



Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Diuji

Pengujian Sarana Penangkapan Ikan adalah pemeliharaan, pengembangan dan pengujian sarana penangkapan ikan sesuai dengan ISO 17025:2017.

Permohonan sarana penangkapan ikan yang diuji adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga untuk dilakukan pengujian sarana penangkapan ikan di laboratorium BBPI.

Perhitungan indikator IKU ini adalah jumlah permohonan sarana penangkapan ikan yang diuji di laboratorium BBPI dibandingkan dengan jumlah permohonan pengujian sarana penangkapan ikan selama satu tahun.

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	100,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 7 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi
Triwulan I 2023 **-%**

Realisasi
Triwulan I 2024 **-%**

Realisasi
Triwulan I 2025 **-%**

Realisasi
Triwulan I 2026 **-%**

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi
Triwulan I 2026 **-**

Target Menengah
Dalam Renstra **-**

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 7 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realiasasi IKU 7 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara semesteran.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 7 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara semesteran.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 7 antara lain :

Januari

1.

Penurunan kapal uji dan pembelian bahan uji mesin

2.

Pelaksanaan Pengujian Mesin OBM 15 HP dan 40 HP merek LC Power Pelanggan PT Majulah Putra Bangsa

3.

Pelaksanaan Pengujian Jaring PA Multi pelanggan PT King Dragon

4.

Pelaksanaan Pengujian Mata Pancing pelanggan PT PSPI

5.

Pelaksanaan Pengujian Mesin OBM 15 HP Merek Mercury Pelanggan PT Marina Maju Jaya

Februari

1.

Pengujian Mesin OBM 15 HP – Merk Mercury-PT Marina Maju Jaya

2.

Pengujian Benang dan Mata Jaring PT Arteria Daya Mulia

3.

Pengujian Benang dan Mata Jaring PT Indoneptune Net

Maret

1.

Pengujian Benang dan Mata Jaring PT Indoneptune Net

2.

Kalibrasi UTM dan Pemeliharaan Kapal Uji

Kegiatan di triwulan I berfokus pada persiapan infrastruktur pengujian agar validitas data terjaga diantaranya Memastikan alat uji beban putus tali (*breaking strength*), alat ukur mata jaring, dan perangkat uji material lainnya dalam kondisi prima dan Audit internal untuk memastikan seluruh personel

laboratorium bekerja sesuai SOP. Ketersediaan bahan uji laboratorium di awal tahun sangat krusial agar tidak terjadi penundaan saat permohonan pengujian mulai dilaksanakan. Kegiatan pengujian sesuai permohonan yang masuk ke laboratorium BBPI juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan SOP yang ditetapkan.

Kendala dan Permasalahan **Capaian IKU**

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 7 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Pengujian material alat tangkap memerlukan bahan uji sekali pakai yang spesifik, sehingga keterbatasan anggaran mengakibatkan tidak dapat melayani permohonan seluruhnya meskipun alat tersedia.

2.

SDM yang terbatas harus menangani beban kerja yang tinggi mengakibatkan dilema dalam mengejar target penyelesaian IKU atau menjaga integritas prosedur uji yang memerlukan ketelitian.



Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Disertifikasi

Sertifikasi Produk Sarana Penangkapan Ikan adalah pemeliharaan, pengembangan dan sertifikasi penggunaan tanda SNI sesuai dengan ISO 17065:2012.

Permohonan sarana penangkapan ikan yang disertifikasi adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga untuk dilakukan sertifikasi sarana penangkapan ikan melalui lembaga sertifikasi produk BBPI

Perhitungan indikator IKU ini adalah Jumlah permohonan sarana penangkapan ikan yang disertifikasi dan disurveillance di laboratorium BBPI dibandingkan dengan jumlah permohonan sertifikasi dan surveillance sarana penangkapan ikan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun.

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	3,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 8 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 8 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realisasi IKU 8 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 8 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 8 antara lain :

Januari

1.

Penetapan anggaran dan personil kegiatan serta pembahasan rencana kegiatan selama tahun 2026

Februari

1.

Pendaftaran reakreditasi dan melengkapi dokumen akreditasi ISO 17025

Maret

1.

Melakukan pembayaran iuran tahunan

2.

Pembahasan dokumen persiapan reakreditasi ISO 17025 dan sharing awareness ISO 17065

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada penguatan legalitas dan kesiapan operasional dengan melakukan survailans internal untuk memastikan skema sertifikasi BBPI tetap diakui oleh KAN

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 8 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan proses sertifikasi menjadi terhambat dimana diperlukan audit ke lokasi produsen yang memerlukan biaya perjalanan serta perlunya dilakukan pendampingan agar minat pihak ketiga terhadap sertifikasi di laboratorium BBPI tidak menurun karena biaya yang dianggap mahal

2.

Keterbatasan personil teknis di laboratorium sehingga harus melakukan double beban kerja yang mengakibatkan dapat menurunkan objektivitas dan kualitas audit. selain itu juga ISO 17065 yang mensyaratkan adanya pemisahan antara personel untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan sehingga sulit dipenuhi secara ideal,



Persentase Kerjasama Yang Implementatif

Kerjasama yang implementatif adalah rencana aksi yang disusun untuk mendukung tercapainya kegiatan tugas dan fungsi BBPI.

Perhitungan indikator IKU ini adalah Persentase jumlah rencana aksi yang mendukung kegiatan tugas dan fungsi BBPI yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang mendukung kegiatan tugas dan fungsi BBPI yang telah ditetapkan.

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	100,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 9 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 9 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realiasasi IKU 9 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 9 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 9 antara lain :

Januari

1.

Penetapan anggaran dan personil kegiatan serta pembahasan rencana kegiatan selama tahun 2026

Februari

1.

Pembuatan modul materi bimtek API dan perbengkelan di lokasi KNMP

Maret

1.

Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Universitas Semarang untuk pendampingan KNMP dan magang

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada inventarisasi dan sinkronisasi agar rencana aksi tidak berbenturan dengan keterbatasan sumberdaya dengan melakukan penyiapan dokumen teknis dan memetakan instansi pemerintah, swasta atau akademisi yang memiliki keselarasan program engan tugas fungsi BBPI.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 9 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan implementasi bergantung pada ketersediaan dana dari pihak mitra sehingga rencana aksi menjadi tidak terlaksana

2.

Keterbatasan personil yang melakukan double beban kerja mengakibatkan administrasi kerjasama menjadi kurang implementatif.

IKU 10

Persentase Peningkatan Kompetensi Nelayan

Peningkatan kompetensi nelayan adalah meningkatnya kompetensi nelayan setelah mengikuti bimbingan teknis.

Perhitungan indikator IKU ini adalah Persentase jumlah nelayan dengan nilai hasil post test >75 dibandingkan jumlah nelayan yang mengikuti bimbingan teknis.

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	80,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 10 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 10 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan

bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realisasi IKU 10 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara semesteran.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 10 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara semesteran.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 10 antara lain :

Januari

1.

Penetapan anggaran dan personil kegiatan serta pembahasan rencana kegiatan selama tahun 2026

Februari

1.

Koordinasi persiapan kegiatan bimtek API dan SKN bersama Diskan Sidoarjo

Maret

1.

Kegiatan bimtek calon teknisi bengkel nelayan di KNMP Cirebon

2.

Kegiatan bimtek sertifikasi kecakapan nelayan di Kabupaten Demak dengan yayasan TAKA

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada penyusunan modul teknis yang sederhana dan aplikatif bagi nelayan dengan menyesuaikan materi dengan tren teknologi penangkapan ikan terbaru serta melakukan survei awal untuk memetakan tingkat pengetahuan dasar nelayan guna menyesuaikan kedalaman materi. Pentingnya optimalisasi metode pelatihan untuk memudahkan visualisasi materi serta memberikan pendampingan pasca bimtek oleh penyuluh perikanan untuk memastikan kompetensi yang diperoleh telah diterapkan. Pemberian sertifikat kompetensi bagi nelayan yang telah berhasil mencapai kelulusan sebagai motivasi belajar.

Kendala dan Permasalahan **Capaian IKU**

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 10 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan pelaksanaan bimtek menjadi terbatas

2.

Keterbatasan personil yang melakukan double beban kerja mengakibatkan instruktur akan sulit menstransfer ilmu kepada nelayan yang berakibat pada nilai post-test rendah serta proses pelaksanaan bimtek menjadi tidak maksimal.

IKU 11

Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Balai Besar Penangkapan Ikan

Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan memenuhi indikator hasil WBK lebih atau sama dengan 75.

Formula perhitungan IKU ini adalah Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yang terdiri dari :

1. Komponen pengungkit 60%
(pemenuhan 30%, reform 30%,)
2. Komponen Hasil 40% (birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5% dan pelayanan public yang prima 17,5%)

Kriteria WBK

Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40%. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.

2.

Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.

3.

Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15

Proses pembangunan WBK dan WBBM difokuskan pada dua jenis komponen yang harus dibangun dalam Unit Kerja terpilih, yaitu

1. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit beserta bobot masing-masing, yaitu

a) Manajemen Perubahan (5%)

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada Unit Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik

sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.

b) Penataan Tatalaksana (5%)

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

c) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur (15%)

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

d) Penguatan Akuntabilitas (10%)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

e) Penguatan Pengawasan (15%)

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Kementerian.

f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Kementerian secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan public

2. Komponen Hasil

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dengan bobot penilaian 40%. Terdapat 2 (dua) komponen hasil, yaitu:

- 1) terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (bobot 20%)
- 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%)

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	75,50
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 11 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-%
Realisasi Triwulan I 2024	-%
Realisasi Triwulan I 2025	-%
Realisasi Triwulan I 2026	-%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dapat dibandingkan realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 11 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Tidak dapat dianalisa keberhasilan maupun kegagalan capaian realiasasi IKU 11 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 11 dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 11 antara lain :

Januari

1.

Penetapan tim WBK dan rencana kerja setiap area WBK

Februari

1.

monitoring dan evaluasi rencana kerja setiap area WBK

Maret

1.

monitoring dan evaluasi rencana kerja setiap area WBK

Kegiatan bimtek sertifikasi kecakapan nelayan di Kabupaten Demak dengan yayasan TAKA.

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada pembentukan tim yang aktif menginternaslisasi budaya kerja serta memastikan seluruh SOP pelayanan telah terdigitalisasi dan dapat diakses public maupun internal secara transparan, serta melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan, penetapan kinerja dan pemantauan capaian secara berkala. Melakukan publikasi indeks kepuasan masyarakat secara realtime di area pelayanan dan survei persepsi anti korupsi secara berkala kepada pengguna layanan serta menciptakan satu inovasi unggulan yang secara langsung memangkas waktu bagi masyarakat pengguna layanan.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 11 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Seringkali perubahan hanya berhenti pada level pimpinan atau Tim Kerja ZI. Budaya kerja di level staf operasional (akar rumput) masih menggunakan pola lama (*status quo*), sehingga resistensi terhadap sistem baru tetap tinggi.

2.

Banyak unit kerja yang fokus mengumpulkan "tumpukan kertas" (undangan, absen, foto) demi memenuhi Lembar Kerja Evaluasi (LKE), namun tidak melakukan perubahan nyata pada tata kelola. Penguji lapangan biasanya akan menemukan ketidaksinkronan ini saat observasi.

3.

Pengguna layanan seringkali merasa enggan mengisi survei atau mengisi secara asal-asalan (formalitas). Jika ada satu saja keluhan terkait "pungli" atau "kerumitan prosedur" dalam survei, nilai akan anjlok drastis dan menggagalkan ambang batas kriteria WBK



Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Balai Besar Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti

Perhitungan indikator IKU ini adalah Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BBPI terhadap seluruh jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan kepada BBPI

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	86,00
Target TW I (persen)	86,00
Realisasi TW I (persen)	100,00
Prosentase (persen)	116,28

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU 12 telah mencapai target 86 yaitu 100 dengan prosentasi capaian 116,28 persen.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi
Triwulan I 2023 **100%**

Realisasi
Triwulan I 2024 **100%**

Realisasi
Triwulan I 2025 **100%**

Realisasi
Triwulan I 2026 **100%**

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama 4 tahun berturut-turut pada periode triwulan I mencapai 100% dimana BBPI telah memiliki sistem automasi manajemen tindak lanjut agar tidak terjadi adanya tumpukan rekomendasi dari tahun ke tahun sehingga anggaran dan sumberdaya di tahun berjalan dapat difokuskan sepenuhnya pada kinerja dan kegiatan tugas dan fungsi BBPI.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi
Triwulan I 2026
Target Menengah
Dalam Renstra

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 12 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan capaian IKU 12 dikarenakan penyelesaian rekomendasi yang langsung ditindaklanjuti serta kualitas bukti dukung menunjukkan telah sesuai dengan

rekomendasi yang diberikan dimana menjadi komitmen seluruh pegawai dan pemimpin sebagai key performance indicator individu di setiap bagian yang kooperatif dalam menyelesaikan rekomendasi.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 12 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menunjang capaian realisasi IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 12 antara lain :

Januari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan Januari tahun 2026

Februari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan februari tahun 2026

Maret

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan maret tahun 2026

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada optimalisasi sistem pelaporan internal untuk memantau dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilakukan digitalisasi seluruh bukti dukung dan memastikan softcopy memiliki resolusi yang baik dan dapat terbaca jelas sehingga tidak ada penolakan bukti karena masalah teknis saat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 12 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi terdapat kendala administrasi dan formalitas dimana keterlambatan validasi sering terjadi hingga kualitas bukti dukung yang belum sesuai dengan standar

2.

Adanya rekomendasi yang bersifat finansial dan memerlukan waktu lama sehingga tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu

3.

Adanya perbedaan interpretasi antara penyusun tindak lanjut di BBPI dengan verifikator di Itjen mengenai kapan sebuah rekomendasi dianggap "tuntas"

IKU 13

Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Balai Besar Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti

Perhitungan indikator IKU ini adalah Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BBPI terhadap seluruh jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan kepada BBPI

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	86,00
Target TW I (persen)	86,00
Realisasi TW I (persen)	100,00
Prosentase (persen)	116,28

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 13 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama 4 tahun berturut-turut pada periode triwulan I mencapai 100% dimana BBPI telah memiliki sistem automasi manajemen tindak lanjut agar tidak terjadi adanya tumpukan rekomendasi dari tahun ke tahun sehingga anggaran dan sumberdaya di tahun berjalan dapat difokuskan sepenuhnya pada kinerja dan kegiatan tugas dan fungsi BBPI.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	100%
Realisasi Triwulan I 2024	100%
Realisasi Triwulan I 2025	100%
Realisasi Triwulan I 2026	100%

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	■
Target Menengah Dalam Renstra	■

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 13 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan capaian IKU 13 dikarenakan penyelesaian rekomendasi yang langsung ditindaklanjuti serta kualitas bukti dukung menunjukkan telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dimana menjadi komitmen seluruh pegawai dan pemimpin sebagai key performance indicator individu di setiap bagian yang kooperatif dalam menyelesaikan rekomendasi.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 13 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menunjang capaian realisasi IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 13 antara lain :

Januari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan Januari tahun 2026

Februari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan februari tahun 2026

Maret

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan maret tahun 2026

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada optimalisasi sistem pelaporan internal untuk memantau dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilakukan digitalisasi seluruh bukti dukung dan memastikan softcopy memiliki resolusi yang baik dan dapat terbaca jelas sehingga tidak ada penolakan bukti karena masalah teknis saat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

Kendala dan Permasalahan **Capaian IKU**

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 13 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi terdapat kendala administrasi dan formalitas dimana keterlambatan validasi sering terjadi hingga kualitas bukti dukung yang belum sesuai dengan standar

2.

Adanya rekomendasi yang bersifat finansial dan memerlukan waktu lama sehingga tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu

3.

Adanya perbedaan interpretasi antara penyusun tindak lanjut di BBPI dengan verifikator di Itjen mengenai kapan sebuah rekomendasi dianggap "tuntas"

IKU 15

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP di Balai Besar Penangkapan Ikan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1), dengan perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	77,00
Target TW I (persen)	77,00
Realisasi TW I (persen)	100,00
Prosentase (persen)	120,00

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU 15 telah melebihi target 77% yaitu 100% dengan prosentase kinerja 120% dengan rincian sebagai berikut

Paket RUP Terumumkan	4.266.256.000
Statistik Moner Pagu Pengadaan	4.266.256.000
Selisih	-
Paket RUP Terumumkan	100,00%

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-
Realisasi Triwulan I 2024	120,00
Realisasi Triwulan I 2025	120,00
Realisasi Triwulan I 2026	120,00

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut pada periode triwulan I mencapai 120% dimana BBPI telah memiliki pola perencanaan yang terstruktur diikuti proses identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dilakukan pada awal tahun anggaran, dan tidak menunda pengumuman di SIRUP sehingga tidak terjadi penumpukan pengadaan di akhir tahun.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data pada Tabel mengenai perbandingan realisasi capaian IKU 15 terhadap Target Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa data capaian akumulatif yang dikontribusikan terhadap target jangka menengah Renstra belum dapat dibandingkan dikarenakan belum adanya penyesuaian target renstra terhadap perjanjian kerja tahun 2026.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Untuk membandingkan realisasi dengan standar nasional, maka BBPI membandingkan IKU yang sama dengan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang setara tingkatan eselon II dengan BBPI, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, dengan perbandingan sebagai berikut :

Realisasi BBPI
Triwulan I 2026 **120,00%**

Realisasi PPS NZ
Triwulan I 2026 **120,00%**

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa BBPI dan PPS Nizam Zachman telah konsisten dalam perencanaan yang tidak hanya mengumumkan yang telah ditetapkan di DIPA awal tetapi juga memetakan rencana penggunaan sisa anggaran/optimalisasi. Keberhasilan melampaui ambang batas kepatuhan pasal 11 Perpres 12/2021 menunjukkan bahwa unit kerja dibawah KKP memiliki akselerasi yang lebih cepat dalam transparansi pengadaan dibanding standar minimal nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan capaian IKU 15 dikarenakan BBPI telah mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa dengan akurat serta konsistensi operator SIRUP dan PPK dalam mengimplementasikan pengadaan yang diinput dalam SIRUP baik dari DIPA awal maupun setelah dilakukan revisi sehingga realisasi administrasi selalu mendahului realisasi fisik.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 15 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menunjang capaian realisasi IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 15 antara lain :

Januari

1.

Penginputan pengadaan barang/jasa ke SIRUP oleh operator

2.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan Januari tahun 2026

Februari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan februari tahun 2026

Maret

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan maret tahun 2026

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada proses konsolidasi kebutuhan sejak tahun sebelumnya dan melakukan penginputan paket ke aplikasi secara parallel. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap bulan dilakukan untuk melihat presentase input paket dibandingkan dengan total pagu belanja untuk memastikan hambatan administrative dapat segera diselesaikan.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 15 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Seringnya terjadi keterlambatan sinkronisasi data pagu dari palikasi SAKTI ke SIRUP saat terjadi revisi DIPA diawal tahun dikarenakan beban server yang meningkat tajam

2.

Pengumuman di SIRUP tidak diikuti dengan kesiapan KAK dari PPK sehingga menciptakan celah antara apa yang diumumkan dengan apa yang siap dilelangkan

3.

Adanya double beban kerja pada operator SIRUP sehingga memperlambat proses penginputan paket pengadaan ke SIRUP

IKU 16

Presentase Pengelolaan BMN di Balai Besar Penangkapan Ikan

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan barang milik negara diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur :

1.

Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN Tahun 2026 (12,5%)

2.

Tersedianya usulan penetapan status pemakaian BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan IV baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)

3.

Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IIII Tahun 2026 (25%)

4.

Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2026 didukung BAST/Berita Acara Pemakaian (25%)

5.

Penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan secara tepat waktu (12,5%)

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	82,00
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 16 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-
Realisasi Triwulan I 2024	-
Realisasi Triwulan I 2025	-
Realisasi Triwulan I 2026	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dianalisa perbandingan capaian IKU 16 dengan tahun sebelumnya pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data diatas tidak dapat dianalisa perbandingan capaian IKU dengan target menengah karena periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan maupun kegagalan capaian IKU 16 tidak dapat dianalisa dikarenakan periode perhitungan dilakukan secara tahunan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 16 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menunjang capaian realisasi IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 16 antara lain :

Januari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan Januari tahun 2026

2.

Penyusunan laporan Calk BMN Tahun 2025

Februari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan februari tahun 2026

2.

Inventarisasi aset BMN yang telah rusak dan penginputan SK penghapusan ke aplikasi BAnda

Maret

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan maret tahun 2026

2.

Menyusun BAST atas belanja modal 2026 serta menginput ke dalam aplikasi SAKTI

3.

Koordinasi dengan KPKNL terkait aset gedung kantor

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada review atas ketersediaan aset eksisting dibandingkan dengan beban kerja atau target output 2026, melakukan pendataan aset secara real time ke dalam aplikasi sakti dengan pengajuan usulan PSP ke DJKN setelah BAST terbit, melakukan cek fisik berkala untuk memisahkan aset yang

masih layak pakai dengan yang rusak berat agar segera diajukan usulan penghapusan aset BMN ke pengelola barang dan eselon 1 sehingga tidak membebani anggaran tahun berjalan, dan melakukan sinkronisasi data antara aset BMN dengan bagian keuangan secara bulanan untuk meminimalisir selisih di akhir triwulan.

Kendala dan Permasalahan **Capaian IKU**

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 16 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan realisasi anggaran dikarenakan adanya perubahan kegiatan di tengah tahun berjalan yang mengakibatkan aset yang direncanakan di RKBMN tidak dapat direalisasi

2.

Pengadaan belanja modal yang telah serah terima tidak segera diusulkan pspnya sehingga legalitas penggunaannya belum teradministrasi secara sah menurut ketentuan pengelola barang

3.

Proses penghapusan memerlukan penilaian dari KPKNL dikarenakan bmn yang tidak ditemukan fisiknya maupun nilai limit lelang yang tidak sesuai sehingga dapat menghambat usulan yang berakibat pada penumpukan barang rusak berat di gudang dan memperburuk neraca laporan keuangan

4.

Adanya selisih angka saat rekonsiliasi internal maupun eksternal yang membutuhkan waktu lama mengakibatkan laporan bmn menjadi tidak tepat waktu dan mengurangi kualitas opini laporan keuangan jika data tidak akurat atau terlambat disajikan

IKU 17

Nilai IKPA Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan

Kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) indikator pelaksanaan anggaran yaitu revisi DIPA, halaman III DIPA, pengelolaan UP, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, dispensasi penyampaian SPM dan capaian output.

Perhitungan indikator IKU ini adalah

1.

Revisi DIPA (10%)

Revisi pagu yang diperhitungkan 14 jenis kode revisi

2.

Deviasi Halaman III DIPA (10%)

- a. Perhitungan deviasi per jenis belanja
- b. Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum
- c. Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%

3.

Data kontrak (10%)

Berdasarkan komponen ketepatan waktu.

Kontrak dini, akselerasi kontrak 53

4.

Penyesuaian tagihan (10%)

Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual

5.

Pengelolaan UP dan TUP (10%)

Berdasarkan komponen ketepatan waktu, persentase nominal GUP dan setoran UP

6.

Dispensasi SPM (5%)

Berdasarkan katagori rasio dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IIIV

7.

Penyerapan anggaran (20%)

Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja

8.

Capaian Output (25%)

Berdasarkan komponen ketepatan waktu dan capaian RO

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	91,10
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 17 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-
Realisasi Triwulan I 2024	-
Realisasi Triwulan I 2025	-
Realisasi Triwulan I 2026	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dianalisa perbandingan capaian realisasi IKU 17 dengan tahun-tahun sebelumnya pada triwulan I dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dianalisa perbandingan capaian realisasi IKU 17 dengan target menengah dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan maupun kegagalan capaian IKU 17 tidak dapat dianalisa dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 17 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menunjang capaian realisasi IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 17 antara lain :

Januari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan Januari tahun 2026

Februari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan februari tahun 2026

Maret

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan maret tahun 2026

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada identifikasi kebutuhan paket tahun berjalan sudah sesuai dengan DIPA dan terinput pada aplikasi SAKTI sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun, dilakukan koordinasi secara berkala terkait rencana penarikan dana bulanan agar sesuai antara jadwal kegiatan dengan jadwal penarikan uang di SAKTI sehingga mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi, percepatan serah terima setelah pekerjaan selesai sehingga dapat diproses dengan segera oleh bagian keuangan setelah BAST ditandatangani, melakukan pergantian uang persediaan secara rutin tanpa menunggu saldo minimal untuk menjaga rasio penggunaan uang persediaan tetap tinggi dan meminimalkan setoran sisa dana ke kas negara.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 17 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

deviasi halaman III DIPA yang tinggi akibat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana bulanan

keterlambatan penyelesaian tagihan oleh pihak ketiga dikarenakan proses verifikasi teknis yang lama

3.

Kurangnya koordinasi antara operator SAKTI dengan penanggungjawab kegiatan yang terlambat melaporkan progress fisik yang sudah tercapai di lapangan

IKU 18

***Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran Lingkup Balai Besar
Penangkapan Ikan***

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian

capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	71,75
Target TW I (persen)	-
Realisasi TW I (persen)	-
Prosentase (persen)	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya target dan capaian IKU 18 pada triwulan I 2026 dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi Triwulan I 2023	-
Realisasi Triwulan I 2024	-
Realisasi Triwulan I 2025	-
Realisasi Triwulan I 2026	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dianalisa perbandingan capaian realisasi IKU 18 dengan tahun-tahun sebelumnya pada triwulan I dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Triwulan I 2026	-
Target Menengah Dalam Renstra	-

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tidak dianalisa perbandingan capaian realisasi IKU 18 dengan target menengah dikarenakan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan maupun kegagalan capaian IKU 18 tidak dapat dianalisa dikarenakan perhitungan dilakukan secara semesteran.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 18 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menunjang capaian realisasi IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 18 antara lain :

Januari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan Januari tahun 2026

Februari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan februari tahun 2026

Maret

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan maret tahun 2026

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada sinkronisasi program kerja dengan rencana penarikan dana dengan meningkatkan nilai konsistensi sehingga meminimalkan deviasi, melakukan monitoring dan evaluasi capaian output secara berkala untuk menjamin nilai efektivitas dan mencegah terjadinya blackloading laporan di akhir tahun dan digitalisasi pelaporan dokumen untuk mempermudah pengumpulan bukti fisik untuk pengisian capaian kinerja

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 18 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Adanya anggaran yang tidak terserap karena perencanaan biaya yang kurang akurat dan tidak segera dialihkan ke kegiatan lain yang lebih produktif

2.

Perencana anggaran yang terlalu longgar memudahkan untuk penyerapan namun sisa anggaran yang terlalu besar di akhir tahun mengakibatkan inefisiensi perencanaan

3.

Seringnya dilakukan revisi DIPA menyebabkan NKA memberikan penalti pada revisi bersifat fundamental

IKU 19

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

1.

Persyaratan layanan

2.

Kemudahan prosedur

3.

Waktu penyelesaian

6.

Kesesuaian produk

7.

Kecepatan respon

8.

Kemudahan fitur

4.

Kesesuaian biaya

9.

Kualitas isi/sarana

5.

Layanan Konsultasi

Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target dan Realisasi

Target 2026 (persen)	88,80
Target TW I (persen)	88,80
Realisasi TW I (persen)	92,64
Prosentase (persen)	104,64

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU telah melebihi target 88,80 yaitu 92,64 dengan prosentase capaian 104,64 persen, dengan rincian sebagai berikut

Jumlah responden 83
(orang)

Persyaratan layanan 3,687
(nilai IKM)

Sistem, mekanisme, prosedur 3,675
(nilai IKM)

Waktu penyelesaian 3,723
(nilai IKM)

Blaya/tarif 3,759
(nilai IKM)

Kesesuaian produk 3,711
(nilai IKM)

Kompetensi pelaksana 3,675
(nilai IKM)

Perilaku pelaksana 3,699
(nilai IKM)

Penanganan pengaduan 3,711
(nilai IKM)

Sarana dan prasarana 3,711
(nilai IKM)

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Realisasi
Triwulan I 2023 -

Realisasi
Triwulan I 2024 **89,18**

Realisasi
Triwulan I 2025 **95,54**

Realisasi
Triwulan I 2026 **92,64**

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang sangat impresif (2024 ke 2025) sebesar 7,13% yang berarti terdapat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta sarana dan prasarana fasilitas yang dirasakan manfaatnya, dan mengalami penurunan sebesar 3,03% (2025 ke 2026) yang disebabkan adanya aspek pelayanan yang mengalami saturasi atau ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat sehingga standar sangat baik di tahun sebelumnya dianggap sebagai standar biasa di tahun 2026.

Perbandingan dengan target menengah

Realisasi
Triwulan I 2026 **92,64**

Target Menengah
Dalam Renstra **88,88**

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan public di BBPI telah berada diatas standar yang direncanakan untuk periode menengah, yang mencerminkan efektivitas sistem pelayanan telah diimplementasikan meskipun realisasi fluktuasi di setiap triwulan, sistem pelayanan BBPI telah memiliki baseline yang kuat sehingga tidak jatuh dibawah target minimal yang ditetapkan di renstra.

Membandingkan realisasi dengan standar nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

Analisa keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan capaian IKU 19 membuktikan bahwa standar internal BBPI lebih tinggi daripada standar minimal yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat bukan sekedar menggugurkan kewajiban administrative. Adanya transparansi pada persyaratan dan biaya menjadi fondasi utama dari indeks kepuasan yang tinggi. BBPI juga telah berhasil melakukan mitigasi risiko untuk meminimalisir adanya

pengaduan dan menindaklanjuti saran dan masukan dari pengguna dengan cepat.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak dapat dianalisa efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 19 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menunjang capaian realisasi IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang kinerja

Hingga triwulan I, program/kegiatan yang menunjang tercapainya realisasi IKU 19 antara lain :

Januari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan Januari tahun 2026

Februari

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan februari tahun 2026

Maret

1.

Monitoring dan evaluasi kegiatan BBPI bulan maret tahun 2026

Pada triwulan I, kegiatan berfokus pada modernisasi sarana dan prasarana utama melalui pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas, peningkatan pelaksanaan service excellence bagi petugas pelayanan untuk meminimalisir complain dan pengaduan dari pengguna, penguatan sistem penanganan pengaduan secara real time serta tindak lanjut yang memiliki batas waktu sehingga masyarakat merasa didengarkan, sosialisasi dan edukasi standar pelayanan di area public dan media digital.

Kendala dan Permasalahan Capaian IKU

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian realisasi IKU 19 dan telah ditindaklanjuti sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja BBPI Tahun 2026, antara lain :

1.

Adanya ketidakseimbangan antara kecepatan digitalisasi dengan prosedur teknis dimana pengguna layanan menginginkan proses yang cepat namun keterbatasan petugas layanan

menyebabkan penilaian unsur waktu pelayanan menjadi menurun

2.

penurunan nilai pada unsur perilaku pelaksana seringkali disebabkan oleh kelelahan petugas layanan atau adanya rotasi pegawai yang belum sepenuhnya menguasai standar service excellence BBPI

3.

Adanya penurunan persepsi kenyamanan pengguna layanan akibat beban penggunaan fasilitas operasional yang telah mencapai titik jenuh dikarenakan sarana pendukung mulai mengalami penurunan fungsi sebelum masa penyusutan yang diperkirakan

Bab IV

Penutup

A.

Kesimpulan

Realisasi Anggaran BBPI Triwulan I TA. 2026

Hingga Triwulan I 2026 realisasi anggaran BBPI telah mencapai **19,00%** sebesar **Rp.2.099.990.799,-** (dua milyar Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut

No	Program	Anggaran (RP)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan pengawakan kapal perikanan	19.208.910
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.080.781.889
TOTAL		2.099.990.799

Capaian Kinerja BBPI Triwulan I TA. 2026

IKU 1

Penerimaan PNBP Non SDA di Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(juta) **213.891**

Realisasi
(juta) **108.110**

IKU 12

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Target
(persen) **86**

Realisasi
(persen) **100**

IKU 15

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP di Balai Besar Penangkapan Ikan

Target
(persen) **77**

Realisasi
(persen) **100**

IKU 19

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan

Target **88,80**
(nilai)

Realisasi **92,64**
(nilai)

B. Kendala

Dalam pencapaian realisasi kinerja, tim kerja mengalami beberapa kendala antara lain

1.

Adanya efisiensi dan perubahan/revisi anggaran sehingga menghambat kegiatan

2.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi tim kerja dan pusat dalam beberapa kegiatan teknis sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda

3.

Kurangnya koordinasi antar penanggungjawab kegiatan dengan pengelola keuangan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda

4.

Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten sehingga mengharuskan sumberdaya manusia tersebut mendapatkan pekerjaan yang melebihi kapasitas sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan

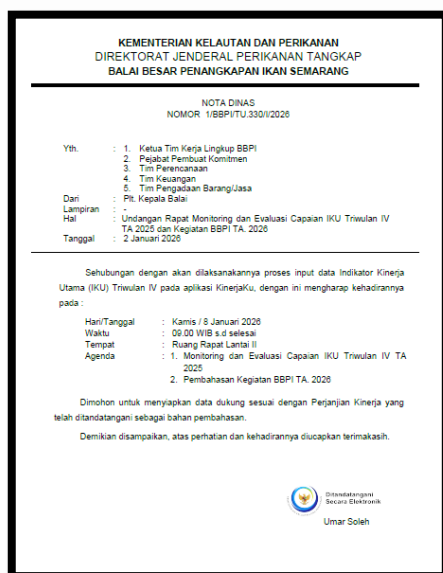
5.

Penyampaian data dukung IKU yang tidak tepat waktu

C. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dalam penyusunan Laporan Kinerja BBPI Tahunan 2025 terdapat beberapa hal yang disarankan, dan telah ditindaklanjuti antara lain

1. Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi IKU Triwulan IV 2025 pada hari kamis tanggal 8 Januari 2026



D. Penghargaan

Hingga Triwulan I 2026, BBPI tidak menerima penghargaan dari pihak eksternal.

E.

Saran

Dalam penyusunan Laporan Kinerja BBPI Triwulan I 2026 ini terdapat beberapa hal yang dapat disarankan untuk peningkatan kinerja BBPI tahun berikutnya yaitu

1.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan PNBP

2.

Meningkatkan kolaborasi dengan ahli teknologi perikanan untuk menghasilkan rekomendasi teknis yang inovatif dan berbasis riset

3.

Menyusun jadwal kajian ulang SNI secara berkala untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kondisi yang berubah

4.

Mempercepat proses uji dan sertifikasi sarana penangkapan ikan untuk mempercepat adopsi teknologi baru oleh nelayan

5.

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja untuk memastikan bahwa setiap kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata

6.

Meningkatkan akses nelayan terhadap pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mereka, terutama dalam teknologi penangkapan ikan dan keberlanjutan

7.

Menyusun sistem tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi pengawasan dan melakukan pemantauan terhadap implementasinya

8.

Meningkatkan pengawasan dan pelatihan terhadap ASN untuk memperbaiki profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas

9.

Memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada

10.

Melakukan audit BMN secara rutin dan menggunakan aplikasi berbasis teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan yang lebih efisien

11.

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemantauan dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja BBPI secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja BBPI Triwulan I 2026 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Semoga Laporan Kinerja BBPI Triwulan I 2026 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja BBPI Triwulan I 2026 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja BBPI di triwulan selanjutnya



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Umar Soleh**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Besar
Penangkapan Ikan


Umar Soleh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Balai Besar Penangkapan Ikan	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Balai Besar Penangkapan Ikan (juta rupiah)	213.891
2	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Balai Besar Penangkapan Ikan	2	Persentase Desain Sarana Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap (persen)	100
		3	Persentase Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap (persen)	100
		4	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diusulkan (rekomendasi)	3
		5	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diperoleh Dari Perumusan Standar (rekomendasi)	3
		6	Standar Nasional Indonesia (SNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Dikaji Ulang (rekomendasi)	3
		7	Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Diuji (persen)	100
		8	Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Disertifikasi (persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		9	Persentase Kerjasama Bidang Perikanan Tangkap Yang Implementatif (persen)	100
3	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi di Balai Besar Penangkapan Ikan	10	Persentase Peningkatan Kompetensi Nelayan (persen)	80
4	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Besar Penangkapan Ikan	11	Nilai PM Pembangunan ZI WBK Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	75,5
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	86
		13	Nilai PM SAKIP Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	88,2
		14	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Penangkapan Ikan (indeks)	84,5
		15	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP di Balai Besar Penangkapan Ikan (persen)	77
		16	Persentase Pengelolaan BMN di Balai Besar Penangkapan Ikan (persen)	82
		17	Nilai IKPA lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	92,1
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	71,75
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan (indeks)	88,80

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	439.508.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	19.635.728.000
Total Anggaran Balai Besar Penangkapan Ikan		20.075.236.000

Jakarta, 14 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Besar
Penangkapan Ikan


Umar Soleh



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174
TELEPON : (024) 3583065, 3583068
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppl.semarang@kkp.go.id

6 April 2026

Nomor : B.132/BBPI/TU.140/IV/2026
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Capaian Realisasi IKU

Yth. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan
di tempat

Sehubungan dengan terlaksananya kegiatan terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Tahun 2026 pada Triwulan I yaitu IKU 1 “Penerimaan PNBP Non SDA di Balai Besar Penangkapan Ikan” dengan realisasi capaian sebesar Rp.53.470.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana berikut :

Kode	Target	Realisasi	%
425151	74.631.000	19.070.000	25,55
425289	28.000.000	42.000.000	150,00
425629	107.360.000	47.040.000	43,82
425692	3.900.000		0,00
	213.891.000	108.110.000	50,54

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penanggungjawab IKU

Nova Santosa

Laporan Realisasi Per Jenis Tarif (Dalam Rupiah)				
Kementerian/Lembaga : 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Unit Eselon I : 03 - Ditjen Perikanan Tangkap				
Satuan Kerja : 239150 - BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN				
Periode : Januari s.d. Maret				
Tahun Anggaran : 2026				
PP - Jenis Tarif	Satuan	Akun	Volume	Realisasi
PP NO. 85 TAHUN 2021				
III. PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN ~ Pelayanan Pengujian Sarana Penangkapan Ikan ~ 3. Bahan Jaring/Jaring per Sampel	per sampel bahan	425629	196	47.040.000
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ~ A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan ~ 2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk: ~ e. Asrama ~ 1) Masyarakat Umum (dalam rangka Kegiatan Kelautan dan Perikanan) ~ a) Air Conditioner	per orang per hari	425151	16	1.280.000
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ~ A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan ~ 2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk: ~ e. Asrama ~ 2) Mahasiswa/Pelajar (di Luar Peserta Didik di Lingkungan KKP) ~ a) Air Conditioner	per orang per hari	425151	176	7.040.000
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ~ A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan ~ 2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk: ~ h. Ruang Pertemuan/Aula ~ 6) Air Conditioner Kapasitas ≥51 s.d. 100 orang	per hari	425151	1	500.000
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ~ B. Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin ~ 4. Pelayanan PenggunaanPeralatan Pengembangan Penangkapan Ikan ~ l. Jangka Sorong	per unit per hari	425151	50	250.000
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ~ B. Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin ~ 4. Pelayanan PenggunaanPeralatan Pengembangan Penangkapan Ikan ~ y. Alat Perbengkelan (Toolkit, Las, Bubut, Bor, Uji Torsi)	per paket	425151	4	400.000
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ~ C. Pelayanan Penggunaan Transportasi ~ 1. Kapal ~ f. Kapal Survei	per jam per unit	425151	24	9.600.000
PP No. 47 Tahun 2023				
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu ~ Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	frekuensi	425911	2	19.945.881
PMK No. 1 Tahun 2025				
I. JASA PENGUJIAN LABORATORIUM ~ N. Pengujian Sarana Penangkapan Ikan ~ 1. Pengujian Mesin Kapal s.d. 50 Horse Power	Per Jenis Pengujian	425289	6	42.000.000

PP - Jenis Tarif	Satuan	Akun	Volume	Realisasi
Total Realisasi PNBP Fungsional (A)				128.055.881
Total Realisasi PNBP Umum (B)				0
Total Realisasi (A + B)				128.055.881



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174
TELEPON : (024) 3583065, 3583068
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpbi.semarang@kkp.go.id

13 April 2026

Nomor : B. 156/BBPI/TU.140/VII/2026
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Capaian Realisasi IKU

Yth. Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan
Ikandi tempat

Sehubungan dengan terlaksananya kegiatan terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja
Utama Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Tahun 2026 pada Triwulan I antara lain :

No	IKU	Target	Capaian
1	IKU 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	86	100
2	IKU 15 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP di Balai Besar Penangkapan Ikan	77	100
3	IKU 19 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan	88,80	92,64

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penanggungjawab IKU



Nova Santosa

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

 (01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000	195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000	978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000	996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000	903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000	748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000	858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000	397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000	754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000	508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000	705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000	50,518,334,000			
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000	758,474,978,000			
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000	20,299,569,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000	16,681,384,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000	20,840,752,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000	15,211,781,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000	549,904,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000	18,740,296,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000	9,711,004,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000	7,617,665,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000	13,622,708,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000	12,492,975,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000	9,671,447,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000	6,557,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
12		BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	326,938,554,000	326,938,554,000			
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000	1,730,900,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000	3,306,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000	12,655,559,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000	2,047,982,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000	19,357,989,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000	1,823,939,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000	18,089,136,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000	5,759,647,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000	7,980,873,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000	4,715,445,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000	2,407,153,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000	4,821,203,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000	1,668,251,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000	1,336,284,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000	4,040,473,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000	2,018,843,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000	34,580,706,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000	1,759,090,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
02	INSPEKTORAT JENDERAL		15,127,743,000	15,127,914,000			
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000	15,127,914,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan

 (06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		158,069,244,000	158,066,570,000			
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000	7,347,589,000	0	100.0000%	Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000	150,718,981,000	2,674,000	100.0018%	Lebih Terumumkan

 (07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		1,170,166,198,000	1,169,007,198,000			
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000	6,455,753,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000	3,199,403,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000	1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10%	Lebih Terumumkan

 (04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 968/DJPT.1/OT.710/IV/2026

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Dari : Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Perubahan Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026

Tanggal : 9 April 2026

Menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, nomor 939/DJPT.1/OT.710/IV/2026, tanggal 7 April 2026 perihal Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan perubahan hasil validasi SKM Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan I Tahun 2026 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 7 April 2026;
3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan I Tahun 2026 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
 - a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,80;
 - b. Jumlah responden sebanyak 4.088 dengan hasil SKM **93,57** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**);
 - c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 41 layanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
 - d. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPN Sibolga dengan nilai sebesar 97,58. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dengan nilai 89,02
 - e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan

- Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,74;
5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:
- Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;
 - Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;
 - Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan I Tahun 2026 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **14 April 2026**.
 - memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.
6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan I Tahun 2026 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran
 Nomor : 968/DJPT.1/OT.710/IV/2026
 Tanggal : 9 April 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	83	3,687	3,675	3,723	3,759	3,711	3,675	3,699	3,711	3,711	92,64
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68	3,735	3,809	3,765	3,750	3,706	3,603	3,779	3,824	3,794	93,79
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,786	3,714	3,857	3,714	95,44
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	242	3,595	3,587	3,562	3,562	3,558	3,562	3,554	3,537	3,529	89,02
PPN Ambon	98	3,776	3,878	3,765	3,806	3,755	3,867	3,837	3,765	3,816	95,18
PPN Brondong	210	3,776	3,738	3,710	3,695	3,724	3,629	3,686	3,519	3,429	91,40
PPN Karangantu	228	3,746	3,737	3,719	3,807	3,702	3,719	3,741	3,627	3,526	92,57
PPN Kejawan	153	3,654	3,725	3,686	3,654	3,634	3,699	3,706	3,634	3,614	91,68
PPN Kwandang	450	3,878	3,896	3,816	3,842	3,776	3,782	3,809	3,789	3,773	95,44
PPN Palabuhanratu	173	3,711	3,723	3,665	3,642	3,717	3,676	3,711	3,682	3,723	92,36
PPN Pekalongan	86	3,907	3,837	3,860	3,907	3,814	3,884	3,907	3,849	3,663	96,19
PPN Pemangkat	141	3,801	3,801	3,794	3,844	3,809	3,780	3,830	3,837	3,823	95,33
PPN Pengambengan	164	3,652	3,652	3,591	3,683	3,659	3,549	3,659	3,616	3,579	90,67
PPN Prigi	129	3,744	3,705	3,674	3,690	3,690	3,659	3,713	3,682	3,698	92,38

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sibolga	443	3,910	3,901	3,901	3,901	3,907	3,901	3,907	3,896	3,905	97,58
PPN Sungailiat	179	3,832	3,849	3,816	3,782	3,810	3,721	3,743	3,754	3,782	94,69
PPN Tanjung Pandan	52	3,942	3,865	3,788	3,904	3,846	3,827	3,885	3,846	3,808	96,42
PPN Ternate	129	3,760	3,736	3,729	3,713	3,729	3,736	3,791	3,744	3,744	93,56
PPN Tual	42	3,786	3,619	3,619	3,595	3,667	3,595	3,667	3,524	3,548	90,61
PPP Teluk Batang	46	3,761	3,783	3,761	3,804	3,870	3,783	3,804	3,870	3,826	95,17
PPS Belawan	123	3,650	3,634	3,634	3,667	3,602	3,626	3,634	3,626	3,553	90,63
PPS Bitung	313	3,757	3,728	3,700	3,693	3,719	3,684	3,706	3,684	3,677	92,63
PPS Bungus	133	3,917	3,639	3,917	3,647	3,902	3,632	3,902	3,677	3,887	94,78
PPS Cilacap	111	3,901	3,901	3,847	3,874	3,838	3,838	3,874	3,856	3,883	96,70
PPS Kendari	63	3,857	3,841	3,841	3,825	3,841	3,762	3,825	3,794	3,794	95,50
PPS Nizam Zachman	215	3,698	3,670	3,656	3,600	3,637	3,595	3,660	3,633	3,595	90,96
DJPT	4088	3,781	3,767	3,747	3,749	3,745	3,717	3,758	3,717	3,705	93,57

1.